

PUSARAN GLOBALISASI DAN RESIDU TRANSISI DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Angga Nurdin Rachmat
angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstract

Unavoided Globalization for all countries and society has brought democracy that bring toward social and political condition. Democracy indeed can make a positif development for society, but in the new democratic countries, democracies seems make cause various social and political unrest in a society that is not yet fully capable to practiced democracy in full spektrum. Reffering from these conditions, this article will provide a discussion of how globalization has brought democracy and residue in Indonesia. This article uses qualitative methods with data obtained from literature review. This article is a report derived from a residue of democracy that is part of a communicator formed from conflict and disintegration of society. Therefore, the affirmation of the nation identity through Pancasila becomes the solution for the residue of democracy wich was difficult to avoid.

Key Words : Democracy Transition, Globalization, Indonesia, Society

Pendahuluan

Globalisasi telah membawa dunia tanpa sekat, menyebabkan pesatnya penyebaran berbagai gagasan keseluruh penjuru dunia. Demokrasi menjadi gagasan yang menyebar dengan pesat seiring dengan globalisasi. Dalam era globalisasi saat ini, isu mengenai demokrasi menjadi sangat relevan untuk dibahas merujuk kepada dua alasan (Winarno, 2011 : 123) ; pertama, adanya pergeseran kekuasaan yang mendorong pentingnya melakukan redefinisi atas peran negara. Kedua, menguatnya tatanan neoliberal yang menciptakan kemiskinan dan ketimpangan dalam skala luas. Dalam konteks ini, demokrasi menjadi pisau bermata dua, pada satu sisi dapat digunakan sebagai instrumen dalam melepaskan represifme negara. Dengan demikian sisi positif dari globalisasi yang mempunyai manfaat bagi sebuah negara adalah bahwa globalisasi mempercepat proses demokratisasi diberbagai negara, hal ini terutama terjadi di negara-negara yang otoriter atau mempraktekan hegemoni kekuasaan negara dengan sangat dominan dengan segala desakan dan kesadaran yang ditimbulkannya (Samekto, 2000 : 8-9).

Indonesia saat ini diposisikan sebagai model bagi negara berkembang dalam mempraktekan demokrasi ditengah keberagaman suku bangsa, budaya dan agama. Berbagai pengakuan ini diperkuat dengan keberhasilan Indonesia dalam menjalankan proses demokrasi dengan melakukan pemilihan umum baik dalam tingkatan pimpinan daerah, anggota legislatif hingga presiden secara langsung dan terbuka. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa praktek demokrasi yang saat ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak menyisakan sebuah “residu” sebagai konsekuensi dari proses demokratisasi. Residu tersebut termanifestasi dalam bentuk munculnya berbagai kelompok maupun paham sebagai konsekuensi penguatan identitas komunal yang didorong ataupun diperkuat melalui derasnya arus globalisasi yang membawa pengaruh liberalisasi ke Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut tulisan ini berusaha untuk memberikan pembahasan mengenai bagaimana “residu” dari proses demokratisasi di Indonesia muncul dan berkembang seiring dengan penguatan arus globalisasi. Pembahasan akan lebih ditekankan kepada bagaimana residu tersebut akan berpengaruh terhadap sistem demokrasi yang saat ini telah dijalankan dan terhadap kehidupan bernegara di Indonesia.

Transisi Demokrasi di Indonesia.

Permasalahan utama yang muncul setelah reformasi bergulir adalah adanya kebebasan tanpa arah yang kebablasan sebagai dasar dari demokrasi. Padahal dalam pelaksanaannya sendiri seharusnya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Inilah yang disebut dan dikenal dengan prinsip hak dan kewajiban. Memahami kebebasan artinya terdapat hak orang lain yang harus dijaga serta dihargai dan kewajiban akan terkait dengan kepatuhan terhadap sistem demokrasi yang dijalankan sesuai dengan jalurnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan harus dibayar dengan pengorbanan yang cukup besar baik harta maupun nyawa dari para pendahulu kita, maka kata demokrasi mempunyai arti penting sebab merupakan salah satu tonggak dari pada fondasi kemerdekaan yang telah dicapai saat ini.

Beranjak dari hal diatas, sistem demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia seharusnya didasarkan pada sistem demokrasi yang berkeadilan. Urgensi dari demokrasi yang berkeadilan adalah sebagai upaya untuk memaknai demokrasi lebih jauh setelah terpenuhinya hak asasi manusia (HAM) yang salah satunya adalah kebebasan berekspresi dalam pemahaman positif dan menhindarkan tindakan-tindakan anarkis. Maka, melalui pemahaman dan pencapaian setiap

tahapan demokrasi yang baik dan benar harus senantiasa dikedepankan untuk menghasilkan masyarakat yang taat pada aturan hukum demi mencapai kesejahteraan.

Demokrasi menjadikan masyarakat sebagai pusat dari segala aktivitas serta tujuannya. Slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi cerminan mengenai jaminan akan hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan. Atas dasar tersebut maka, hampir semua pengertian demokrasi ini senantiasa menempatkan rakyat pada posisi strategis meskipun dalam kenyataannya hal tersebut tidak seragam diterapkan pada berbagai negara. Sebagai suatu sistem politik, pelaksanaan demokrasi dapat dirunut sejak masa Yunani Kuno. Pada masa Yunani kuno institusi yang merepresentasikan rakyatnya dikenal dengan Polis (Negara Kota) sebagai suatu sistem politik yang diorganisasikan dalam rangka memenuhi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jika merujuk pada Huntington (1991) mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi kata kunci dalam wacana dan pergerakan politik dunia dimana seluruh gerakan politik senantiasa didasarkan pada demokrasi. Sehingga, jika merujuk pada istilah demokrasi akan menempatkan rakyat sebagai pusat dari semua aktivitas maupun tujuan.

Bagi Indonesia pada akhir 1998, transisi demokrasi diawali dengan runtuhnya rezim Soeharto melalui tekanan dari mahasiswa. Berakhirnya rezim Soeharto yang menandai dimulainya demokratisasi membawa berbagai gelombang kekerasan di Indonesia. Sistem yang tersentralisasi kemudian seketika berubah terdesentralisasi, kondisi ini membuka peluang kompetisi yang tidak sehat dalam meraih kekuasaan, sumber daya maupun identitas. Kondisi yang dahulu mampu diredam dengan penggunaan kekuatan koersif oleh pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk dikelola dengan baik sehingga kemudian muncul ke permukaan. Transisi demokrasi membuat hilangnya struktur institusional dan mekanisme yang efektif untuk mengatasi konflik yang telah bereskalasi menjadi kekerasan yang pada masa tersebut terjadi di tiga tempat di Indonesia yakni ; kekerasan antar etnis, konflik antar pemerintah dan kelompok separatis dan konflik lokal terkait akses terhadap sumber daya dan kekuasaan politik (World Bank : 2010).

Ciri utama demokrasi selepas reformasi adalah menempatkan kebebasan individu dalam pembentukan struktur politik (Djamra, 2012). Sistem demokrasi yang diusung pasca berakhirnya rezim Orde Baru tidak dapat dipungkiri telah membawa perbaikan melalui demokratisasi dalam bidang politik, sebuah gagasan yang menjadi dasar pada penyusunan ulang sistem politik di Indonesia, hal ini terlihat secara langsung dalam beberapa aspek yang

diantaranya penyelenggaraan pemilu maupun dasar norma sistem politik. Namun, tidak dapat dipungkir seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa demokrasi yang berbasis pada individual dengan berkiblat pada demokras ala barat telah menjadikan setiap individu bebas menyatakan hak dan kehendak politiknya, namun lebih jauh telah membawa substansi politik dan demokrasi menjadi terabaikan dan melenceng dari harapan, kondisi ini terjadi karena politik dan demokrasi lebih dipahami sebagai upaya untuk memperoleh hak atas kebebasan dan sarana untuk meraih kekuasaan. Dalam konteks inilah, konflik, anarki dan kekerasan kembali menempati ruang sosialnya di tengah berlangsungnya proses politik dan demokrasi. Walaupun banyak pemerhati mengatakan bahwa konflik, anarki dan kekerasan pasca reformasi bukanlah bagian dari demokrasi karena tidak terjadi dalam proses berlangsungnya mekanisme demokrasi. Namun dalam konteks ini, penulis melihat bahwa rangkaian kekerasan yang terjadi selepas menguatnya gelombang demokrasi sebagai “residu” yang ditinggalkan dari proses transisi demokrasi.

Indonesia dalam Arus Globalisasi.

Sebagai sebuah negara yang tidak menutup diri akan perubahan dan dinamika internasional, globalisasi merasuk ke Indonesia melalui berbagai bidang. Arus globalisasi berkonsekuensi atas munculnya perkembangan dan perubahan sistem ekonomi yang harus diwaspadai oleh setiap negara, karena seluruh negara tidak dapat menghindarkan diri dari tarikan arus globalisasi tersebut. Atas dasar tersebut maka kemampuan untuk mengintegrasikan ekonomi nasional dengan ekonomi global harus dimiliki setiap negara yang tentu saja bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan serta tujuan nasionalnya. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari demokratisasi yang terjadi memungkinkan arus informasi khususnya yang berasal dari luar tidak dapat dibendung. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global (Madiong dkk, 2018 : 3). Selain itu perluasan isu dalam ruang lingkup global memunculkan masalah yang terkait dengan demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup yang berkontribusi terhadap kondisi domestik sebuah negara.

Melihat arus globalisasi dalam suatu negara, dapat dianalisis melalui tiga aspek dari globalisasi, yaitu internasionalisasi, revolusi teknologi, dan liberalisasi (Baylis dan Smith, 2001 : 290). Sisi Internasionalisasi dapat diukur dengan terjadinya peningkatan transaksi diantara

negara yang diindikasikan dengan arus perdagangan, investasi, dan kapital. Proses internasionalisasi ini ditandai dengan perdagangan, investasi, kapital, dan adanya suatu kebijakan dalam negeri yang memungkinkan sektor swasta untuk bertransaksi di negaranya. Kemudian, alat-alat komunikasi modern (internet, satelit komunikasi, komputer, dll) ikut masuk ke dalam negaranya sebagai tanda terjadinya revolusi teknologi. Revolusi teknologi yang paling mudah dirasakan adalah saat jalinan komunikasi antar negara akan semakin intensif tanpa adabatasan yang merintanginya. Terakhir, liberalisasi dalam bidang ekonomi juga menjadi ciri bagaimana dampak globalisasi di suatu negara, indikatornya adalah penghilangan tarif, kuota, dan hambatan ekonomi lainnya. Melalui kebijakan berbasis liberalisasi pasar membuka kesempatan yang semakin besar bagi masuknya investor asing kedalam negeri.

Bagi Indonesia, nilai-nilai Barat masuk dengan menumpang arus globalisasi yang menyasar pada kalangan masyarakat, hal ini tentu saja bila tidak disikapi secara bijak akan menjadi ancaman terhadap identitas dan budaya asli bangsa Indonesia yang berfungsi untuk mencitrakan nasionalitas kebangsaan dan lokalitas khas dari berbagai daerah di Indonesia (Mubah, 2011 : 253). Meskipun, belum terjadinya kesepakatan mengenai seperti apa identitas asli Indonesia, namun melalui momentum sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dicapai sebuah kesepakatan diantara rakyat Indonesia bahwa mereka bertanah air, berbangsa dan berbahasa Indonesia. Sebagai tanah air Indonesia dimaknai sebagai ruang hidup dan berkembangnya berbagai suku bangsa, bahasa daerah dan kebudayaan daerah. Sebagai bangsa, dimaknai bahwa Indonesia merupakan sebuah kesatuan yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan berbagai aneka budaya yang melekat padanya. Sementara terakhir sebagai pemersatu dan jembatan komunikasi diantara perbedaan bahasa, maka digunakanlah bahasa Indonesia. Persoalannya, semangat persatuan itu kini semakin memudar seiring menjamurnya pemakaian budaya asing dan penggunaan bahasa Inggris yang disebarkan oleh arus globalisasi ke masyarakat Indonesia.

Globalisasi sendiri telah menimbulkan perdebatan mengenai otoritas negara sementara pada saat yang bersamaan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan sosial dan kenegaraan. Negara dihadapkan kepada dilemma antara loyalitas warhanya, antar individu yang kemudian berorientasi kearah keterkaitan dengan nilai global dan pihak yang melakukan “*self defence mechanism*” yang mengarah pada penguatan identitas komunal. Bagi Indonesia kondisi

tersebut diperkuat dengan semakin tingginya arus informasi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik ditambah dengan kemajuan dalam akses internet.

Kemajuan teknologi yang menjadi determinan globalisasi di Indonesia telah memunculkan sebuah fenomena baru yakni gerakan-gerakan sosial melalui media sosial. Berbagai berita baik yang informatif serta dapat dipertanggungjawabkan faktanya maupun yang bersifat menghasut dengan informasi baik yang berasal maupun dari dalam negeri yang diragukan kebenarannya menjadi fenomena tersendiri. Permasalahan ini menjadi dilema tersendiri mengingat bahwa Indonesia dengan sistem demokrasi yang ada saat ini memberikan jaminan terhadap kebebasan berpendapat baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kondisi ini diperburuk dengan pemahaman mengenai kebebasan berpendapat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia dan diperburuk dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya dimana hal ini akan membawa kepada terjadi gesekan sosial di masyarakat yang mengarah kepada terjadinya kekerasan, rasa saling curiga dan bahkan hingga *xenophobia*. Gesekan sosial tersebut dalam konteks ini dimaknai sebagai sebuah “residu” transisi demokrasi yang dibawa melalui arus globalisasi di Indonesia dengan menggunakan instrumen perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Globalisasi dan Demokratisasi dalam Penguatan Identitas Komunal.

Seiring dengan dibukanya keran kebebasan berpendapat dan membentuk berbagai perkumpulan, pasca reformasi 1998 berbagai kelompok masyarakat kemudian mengelompokkan diri dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat maupun organisasi massa (ormas). Perkembangan dari LSM atau Ormas di Indonesia sangat bervariasi baik dari segi ideologi yang mendasari maupun sentimen etnis/ kedaerahan yang mendorong pembentukannya. Kondisi tersebut merupakan sebuah cerminan dari kebebasan berekspresi dari setiap warga negara namun pada sisi lain hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memunculkan eksklusifitas dari ideologi maupun sentimen kedaerahan di dalam masyarakat yang mengarah kepada terbentuknya identitas komunal berdasarkan dua hal tersebut. Bagi negara yang demokratis keberadaan dari LSM/Ormas menjadi salah satu pilar dalam menjamin demokrasi itu sendiri dan tolak ukur dari demokrasi disebuah negara.

Dewasa ini berbagai gesekan sosial didalam masyarakat senantiasa timbul seiring dengan munculnya identitas komunal dari masing-masing kelompok. Identitas komunal terkait dengan etnisitas menjadi salah satu ciri dalam dinamika sosial masyarakat saat ini. Penguatan identitas komunal senantiasa berkembang dalam pra-kondisi dimana sebuah komunitas masyarakat lokal terdesak oleh arus pendatang dari daerah lain, hal ini cenderung terjadi di Kota-Kota Besar di Indonesia sebagai akibat dari urbanisasi yang berkembang. Namun, kondisi ini pun kemudian direspon oleh masyarakat pendatang dengan membuat tandingan dari komunitas lokal di wilayah tersebut dengan membentuk komunitas sesama masyarakat dari daerah yang sama dalam manifestasi pembentukan ormas.

Salah satu identitas komunal yang menguat didasarkan kepada agama yang digunakan sebagai upaya untuk menuntut penegakan syariat agama tersebut di Indonesia. Saat arus globalisasi membawa nilai-nilai liberal yang merasuk ke hampir seluruh sendi kehidupan sosial, maka akan berbanding lurus dengan penguatan identitas komunal dengan berbasis agama. Basis agama yang saat ini tengah menjadi sorotan adalah islam, ormas-ormas yang kemudian mencerminkan fundamentalisme islam berupaya untuk membentengi kelompok mereka dan berusaha “membentengi” negara dari pengaruh tersebut jika kembali kepada nilai-nilai yang mereka anut.

Kekuatan dari kelompok komunal ini dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia tidak dapat dianggap remeh. Kelompok-kelompok ini memiliki kapabilitas untuk menjadi determinan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun stabilitas keamanan nasional. Terlebih dengan arus informasi membuat kelompok komunal khususnya yang berbasis agama islam dapat dipengaruhi oleh aliran-aliran yang berkembang di luar negeri. Dengan kondisi Indonesia yang berada dalam konteks iklim kebebasan yang luas, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang sangat subur bagi perkembangan dari aliran dan ideologi tersebut. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah ditempat asal aliran pemikiran/ideologi tersebut sedang menerapkan kebijakan yang sangat represif untuk menekan kelompok-kelompok tersebut. Perkembangan ini semakin pesat seiring dengan penggunaan jejaring media sosial yang sangat masif serta karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat mudah untuk menyerap berbagai informasi yang diduplikatnya tanpa melakukan filterisasi terhadap informasi maupun paham yang mereka temui.

Residu Demokrasi sebagai Potensi Konflik dan Disintegrasi.

Bagi para pendukungnya, demokrasi menjadi salah satu obat untuk menyelesaikan berbagai konflik, dimana konflik yang ada diselesaikan melalui dialog yang bebas serta tanpa ada tekanan politis dari pihak manapun. Namun hal tersebut tidak dapat dipersamakan, dibeberapa negara dengan keunikan sistem sosial dan kultural seperti di negara-negara berkembang sehingga menimbulkan paradoks dari semangat demokrasi itu sendiri. Merujuk kepada Purweni (2004 : 122) yang menyatakan bahwa berbagai paradoks yang masih berkembang di era reformasi sering membuat kita untuk berpikir ulang dan mengedepankan pertanyaan kritis: Apakah masa transisi ini akan bisa dilewati dengan baik sehingga terbentuk *consolidated democracy*, atau kita gagal melaluinya sehingga yang muncul adalah *consolidated anarchy* yang dapat menggiring kita kembali pada sistem otoritarian dan militeristik.

Menurut Suharso (dalam Mahfud MD, 2002 : 79) salah satu paradoks demokrasi yang patut dikritisi saat ini adalah berkembangnya kekerasan politik, anarki, radikalisme, percekocokan massal yang sering dilanjutkan dengan adu fisik secara kolektif, pemaksaan kehendak, dan berbagai perilaku menyimpang lainnya yang justru mencerminkan perilaku anti demokrasi. Hal ini yang kemudian senantiasa menjadi warna dalam demokrasi yang disenantiasa dipraktekan di Indonesia dewasa ini, bahkan terdapat sebuah paradigma bahwa demokrasi sangat erat dengan kekerasan dan konflik di Indonesia. Kondisi inilah menjadi kontraproduktif dengan semangat awal dari reformasi dan demokratisasi yang dibangun di Indonesia. Bahkan konsolidasi dalam sistem politik dan pemerintahan bukannya konsolidasi demokrasi tetapi justru perkembangan ke arah apa yang disebut *frozen democracy* yang antara lain ditandai dengan berkembangnya konflik etnis, maraknya kekerasan politik secara kolektif, dan lokalitas politik yang berlebihan (Purweni, 2004 : 124). Kegagalan untuk membangun instusi-instusi yang diperlukan sebagai landasan bagi suatu proses transisi demokrasi yang demikian itulah yang telah menjadi sumber dari carut marutnya kehidupan politik nasional saat ini, ketika persaingan politik yang sangat keras di antara kekuatan-kekuatan proto demokratik dan elit-elit politik dilakukan nyaris secara *all out* tanpa landasan etika dan kesantunan politik yang kuat.

Melihat kondisi tersebut, demokrasi tidak menjadi penyebab dari konflik, namun permasalahan konflik yang muncul adalah proses dalam pembentukan demokrasi itu sendiri. Diyakini bahwa bila struktur demokrasi dibentuk secara baik maka akan mampu untuk

mengakomodir berbagai kepentingan etnis. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses transisi demokrasi tidak dapat berjalan secara sempurna dan selalu menyisakan permasalahan yang akan muncul pada masa yang akan datang. Proses transisi demokrasi di Indonesia pun tidak berjalan secara sempurna dan menyisakan residu seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

Transisi demokrasi yang berkiblat kepada nilai-nilai barat, telah menjadi sebuah titik awal dari permasalahan yang muncul saat ini. Demokrasi ala barat yang didasarkan kepada kebebasan individual dimaknai sebagai sebuah nilai universal yang dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia dengan justifikasi sebagai pilar tidak terpisahkan dari demokrasi. Kondisi ini membuat hilangnya konteks tanggungjawab yang dimiliki dalam kebebasan tersebut, sehingga pada akhirnya selalu bergesekan dengan kebebasan dari individu maupun kelompok yang lain serta hilangnya sikap saling menghormati serta toleransi diantara masyarakat di Indonesia.

Kondisi tersebut diperlihatkan dalam berbagai bidang, baik dalam konteks politik praktis, media maupun kelompok masyarakat. Demokrasi seolah menjadi sebuah mantra ampuh dalam memaksakan kepentingan terhadap kelompok lain maupun dalam rangka melakukan diskriminasi. Bahkan dalam skenario terburuk hal tersebut akan berujung dengan berbagai tindakan kekerasan bahkan dapat memicu konflik didalam masyarakat. Konflik yang terjadi baik dalam skala besar maupun konflik kecil pasca reformasi 1998 didominasi dengan sentimen komunal baik terkait dengan etnisitas maupun atribut lain. Terlebih sentimen komunal ini selalu termanifestasi dalam bentuk LSM/ Ormas yang tumbuh didalam sistem demokrasi di Indonesia.

Keberadaan dari LSM/ Ormas di Indonesia dengan mengusung berbagai identitas yang menjadi atribut mereka sangat kontradiktif dengan konteks dari pembentukan LSM/Ormas sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Kontradiksi ini dilihat dari bagaimana keberadaan dari LSM/ Ormas tersebut menimbulkan keresahan karena menjadi instrumen dalam pemaksaan kehendak bahkan melanggar aturan hukum. Fenomena ini terjadi kepada LSM atau Ormas dalam yang ada dalam level nasional maupun lokal, dimana yang menjadi sorotan saat ini adalah Front Pembela Islam (FPI) yang seringkali melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama upaya untuk menegakan nilai islam, demikian pula dengan ormas-ormas kedaerahan lain seperti Forum Betawi Rempug (FBR) sebagai contohnya. Fenomena tersebut tentu saja bertentangan dengan demokrasi yang menjunjung tinggi dialog serta ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Potensi kekerasan yang dilakukan oleh para oknum yang berlandung dibalik LSM/Ormas atas nama demokrasi terlalu rentan untuk bereskalasi menjadi konflik. Kerentanan ini terjadi mengingat bahwa resistensi terhadap gerakan-gerakan LSM/Ormas tersebut dapat memicu reaksi kekerasan lain terhadap mereka. Gesekan-gesekan yang terjadi antara oknum masyarakat maupun LSM/Ormas tersebut dapat meluas tidak hanya dalam tataran lokal, namun sangat mudah untuk menyebar ke berbagai wilayah seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari demokratisasi dan globalisasi membawa permasalahan baru dalam kehidupan sosial dan bernegara. Tidak seperti negara berdasarkan kepada otoritarianisme yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan ketat terhadap arus informasi, Indonesia merupakan negara dimana warganya diberikan predikat sebagai yang paling aktif di dunia dalam penggunaan media sosial. Kebebasan yang dimaknai sebagai kebebasan individual ini yang membuat penggunaan media sosial menjadi kontraproduktif dengan demokrasi itu sendiri.

Media sosial menjadi tempat untuk memberikan pendapat namun tidak disertai dengan pertanggungjawaban. Kondisi ini membuat berbagai hasutan, kebencian maupun berita-berita yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya membanjiri lini massa pada setiap media sosial. Permasalahan muncul saat berbagai hasutan, kebencian dan berita “hoax” tersebut memicu pertentangan di dunia nyata antar sesama masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang, media adalah yang menyediakan informasi, perspektif, dan analisis yang memungkinkan mereka untuk memahami dunia mereka dan berperan serta sebagai bagian dari lingkungan mereka, hal ini menyediakan sebuah sarana penting untuk masyarakat yaitu membuat suara mereka terdengar serta menyediakan mekanisme-mekanisme untuk merumuskan identitas dan menciptakan ruangan-ruangan komunitas. Sebaliknya, pada sisi yang lain kalangan media memiliki peran dalam membentuk dinamika sosial dan politik di masyarakat.

Berbagai kondisi yang berkembang sebagai bentuk “residu” demokrasi sangat berpotensi dalam menyulut konflik sosial di dalam masyarakat. Hal tersebut selalu terjustifikasi dengan sistem demokrasi yang sedang dijalankan di Indonesia. Padahal permasalahan-permasalahan tersebut tidak selayaknya dipraktikkan dalam sistem demokrasi dan bahkan akan mencederai nilai demokrasi itu sendiri. Terlebih apabila permasalahan tersebut tidak dapat diatasi dan semakin

menguat bukan tidak mungkin akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia yang kembali memperkuat identitas komunal mereka yang memicu terjadinya primordialisme. Primordialisme yang kemudian akan menjadi ancaman terhadap kesatuan dan persatuan bangsa karena kembali mengkotak-kotakan masyarakat Indonesia dalam identitas kesukuan, agama maupun ras.

Memanfaatkan Peluang dalam Globalisasi dan Penguatan Demokrasi Berbasis Pancasila.

Berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan residu dalam transisi demokrasi, tidak dapat dilepaskan dari masing-masing sangat kurangnya pemahaman mengenai demokrasi itu sendiri. Bahkan pemahaman mengenai demokrasi yang sebenarnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia tersisihkan oleh pemahaman yang sangat kaku akan demokrasi yang diusung dari nilai-nilai barat. Sistem demokrasi yang dibawa melalui arus globalisasi menawarkan sisi positif dalam perkembangan masyarakat namun juga tidak dapat dipungkiri memiliki sisi negatif yang seyogyanya harus dihindarkan. Namun pada kenyataannya sisi negatif dari demokrasi yang kemudian mengendap sebagai residu demokrasi yang muncul dan berkembang dipermukaan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Keberadaan dari demokrasi dan arus globalisasi memang tidak dapat dihindarkan, namun yang perlu menjadi catatan adalah kemampuan dalam menyaring nilai-nilai dibawa melalui dua fenomena tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai yang dibawa dalam demokrasi dan globalisasi dapat melengkapi maupun sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan memilah nilai-nilai yang masuk, untuk itu perlu menjadi perhatian bahwa kita harus memahami nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka permasalahan yang terkait dengan pemahaman mengenai nilai-nilai negatif dari demokrasi yang dibawa melalui globalisasi akan dapat diminimalisir. Dengan meminimalisir nilai-nilai negatif yang tentunya tidak sesuai, maka kecenderungan akan munculnya residu dari proses transisi demokrasi akan dapat diminimalisir. Sebagai contoh adalah dengan memahami bahwa Indonesia telah memiliki demokrasi yang didasarkan kepada Pancasila, sementara yang dipahami saat ini adalah demokrasi-liberal yang menunjung tinggi nilai-nilai individualisme.

Demokrasi Pancasila secara substansial adalah norma yang mendasari pengaturan penyelenggaraan demokrasi dan pemerintahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia baik secara individual maupun berserikat dalam bentuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga-lembaga negara baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah (Yunus, 2015 : 161). Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural, sementara apabila kita menggunakan demokrasi berbasis liberal maka yang akan muncul adalah primordialisme seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu Pancasila dianggap sebagai pedoman dalam menjalankan demokrasi di Indonesia sehingga residu-residu demokrasi yang ada dapat diminimalisir agar tidak tumbuh menjadi benih-benih perpecahan dan konflik.

Merujuk kepada Alfian (1990 : 190) Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan demokrasi antara lain terletak pada kualitas yang terkandung di dalam dirinya. Di samping itu relevansinya terletak pada posisi komparatif terhadap ideologi-ideologi lain sehingga bangsa Indonesia yang meyakini, menghayati dan memahami mengapa Pancasila adalah ideologi untuk dipakai sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam membangun dirinya dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan politik. Dengan demikian maka, Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang menutup diri terhadap perkembangan global, namun juga tidak menjadi bangsa yang permisif dengan mengadopsi seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam agenda global tersebut. Oleh karena itu Pancasila akan menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat jati diri ditengah arus demokratisasi dan globalisasi yang semakin kuat diusung oleh negara dan organisasi internasional.

Kesimpulan.

Globalisasi dan demokrasi menjadi sebuah kolaborasi yang sangat cocok, dimana masing-masing dapat saling memperkuat baik dalam konteks pengaruh positif maupun negatif bagi sebuah negara maupun masyarakatnya. Indonesia sendiri yang mengalami proses transisi demokrasi, masih mengalami permasalahan terkait dengan residu dari transisi demokrasi tersebut, dimana hal ini kemudian diperkuat dengan globalisasi yang membawa residu tersebut muncul kepermukaan. Residu yang ditinggalkan dari proses transisi demokrasi tersebut adalah pemahaman dangkal mengenai demokrasi yang diartikan sebagai kebebasan secara individual. Kondisi ini kemudian menuntun kepada menguatnya identitas komunal dalam bentuk berbagai

bentuk LSM/Ormas yang berkembang didalam sistem demokrasi. Permasalahan yang kemudian muncul adalah adanya saling berbenturan diantara kelompok-kelompok yang tengah mengalami penguatan identitas komunal.

Benturan diantara identitas komunal tersebut sangat berpotensi dalam menciptakan instabilitas didalam masyarakat serta membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi ini membuat diperlukannya mekanisme dalam rangka meminimalisir eskalasi dari residu demokrasi serta kuatnya arus dari nilai-nilai global ke Indonesia dengan penguatan jati diri bangsa melalui Pancasila. Dalam konteks demokrasi, Indonesia memiliki sistem demokrasi pancasila yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian maka paham mengenai demokrasi liberal yang banyak meninggalkan residu dalam proses transisinya dapat diminimalisir. Dimana saat ini demokrasi yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa tetapi sebaliknya menjadi potensi disintegrasi bangsa. Menyikapi hal tersebut pancasila sudah semestinya menjadi filter untuk menyaring dan memilah nilai-nilai negatif yang masuk melalui demokrasi dan globalisasi sehingga Indonesia tidak menjadi bangsa yang menutup diri dari perkembangan serta tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri akibat gempuran dari nilai-nilai asing.

Daftar Pustaka

- Alfian, Oetoejoe Oesman. 1990. *Pancasila Sebagai Ideologi*. Jakarta : BP-7 Pusat.
- Baylis, Jhon dan Smith, Steve eds. 2001. *Globalization of World Politics 2nd ed*. New York : Oxford University Press.
- Djamra, Nurus Salihin. 2012. ” Demokrasi dan Anarkhi : Kebebasan yang Terdistorsi”. *Jurnal Analisis Politik*. Vol. 1 No. 2. hlm. 1-17.
- Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma : Oklahoma University Press.
- Madiong, Baso.dkk. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan : Civic Education*, Makassar : Celebes Media Perkasa.
- Mubah, A Safril. 2011. “Revitalisasi Identitas Kultural Indonesia di Tengah Upaya Homogenisasi Global”, *Global & Strategi*, Edisi Khusus, (Desember). hlm. 251-260.
- Purweni, Hartuti. 2004. “Demokrasi di Indonesia : Dari Masa ke Masa”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.3 No.2. hlm. 122.

- Samekto, F.X. Adji.2000. *Kapitalisme dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum Modern dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Suharso. 2002. Quo Vadis Demokrasi Indonesia dalam Mahfud MD *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta : LKiS.
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta : CAPS.
- World Bank. 2010. “Mendukung Pembangunan Paska Konflik Di Indonesia”, World Bank Report, diakses dari [www. Conflict and development program](http://www.conflictanddevelopmentprogram.org).
- Yunus, Nur Rohim. 2015. ”Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. *Sosio Dialektika*. Vol. 2 No. 2. hlm. 156-166.